

Implementasi Kebijakan Pendidikan Karakter Di Sekolah

Reziska Maya Kumala

Universitas Jambi

Irwan Irwan

Universitas Jambi

Siti Tiara Maulia

Universitas Jambi

Alamat : Jl. Jambi - Muara Bulian No.KM. 15, Mendalo Darat, Kec. Jambi Luar Kota,
Kabupaten Muaro Jambi, Jambi

Korespondensi penulis : reziskamayakumala141@gmail.com

Abstrack. *Education is one of our efforts to overcome ignorance and poverty in our country, namely Indonesia. Where do we know, that when someone goes to school, that person already knows some things in this world. The author examines in 2023 at one of the schools in Jambi province. In making this article, the author examines a problem by conducting research in several ways, namely by means of observation, interviews, and there are several ways to use field notes. The observation method is carried out in the school environment, this method is useful for understanding what context will be thoroughly examined. In addition to using the observation method, in this study the authors also used the interview method, by interviewing several informants in the school environment and the authors also used the field note method, where field notes function as a supporting tool for discovering theoretical knowledge supported by concrete data. . Implementation is an action or implementation of a plan that is carefully prepared and detailed.*

Keywords : *Policy, Character, School*

Abstrak. Pendidikan merupakan salah satu upaya kita untuk menanggulangi kebodohan dan kemiskinan yang terjadi di negara kita yaitu Indonesia. Dimana kita ketahui, bahwasanya dengan seseorang mengenyam bangku sekolah, maka orang tersebut telah mengetahui beberapa hal yang ada di dunia ini. Penulis meneliti pada tahun 2023 di salah satu sekolah yang ada di provinsi jambi. Di dalam pembuatan artikel ini, penulis meneliti sebuah permasalahan dengan melakukan penelitian dengan beberapa cara yaitu dengan cara observasi, wawancara, serta ada beberapa cara menggunakan catatan lapangan. Metode dengan observasi di lakukan di lingkup sekolah, metode ini bermanfaat untuk memahami konteks apa yang akan di teliti secara menyeluruh. Selain menggunakan metode observasi, di dalam penelitian ini penulis juga menggunakan metode wawancara, dengan cara mewawancarai beberapa informan yang ada di lingkungan sekolah serta penulis juga menggunakan metode catatan lapangan, dimana catatan lapangan ini berfungsi sebagai alat pendukung penemuan pengetahuan teori yang di dukung oleh data yang konkrit. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang disusun secara matang dan terperinci.

Kata Kunci : Kebijakan, Karakter, Sekolah

LATAR BELAKANG

Pendidikan merupakan salah satu upaya kita untuk menanggulangi kebodohan dan kemiskinan yang terjadi di negara kita yaitu Indonesia. Dimana kita ketahui, bahwasanya dengan seseorang mengenyam bangku sekolah, maka orang tersebut telah mengetahui beberapa hal yang ada di dunia ini.

Pendidikan sendiri adalah aspek universal yang selalu harus ada dalam kehidupan manusia. Tanpa pendidikan, manusia tidak akan pernah berkembang dan berbudaya. Di samping itu, kehidupan juga akan menjadi statis tanpa ada kemajuan, bahkan bisa jadi akan mengalami kemunduran dan kepunahan. Oleh karena itu, menjadi fakta yang tak terbantahkan bahwa pendidikan adalah suatu yang niscaya dalam kehidupan manusia.

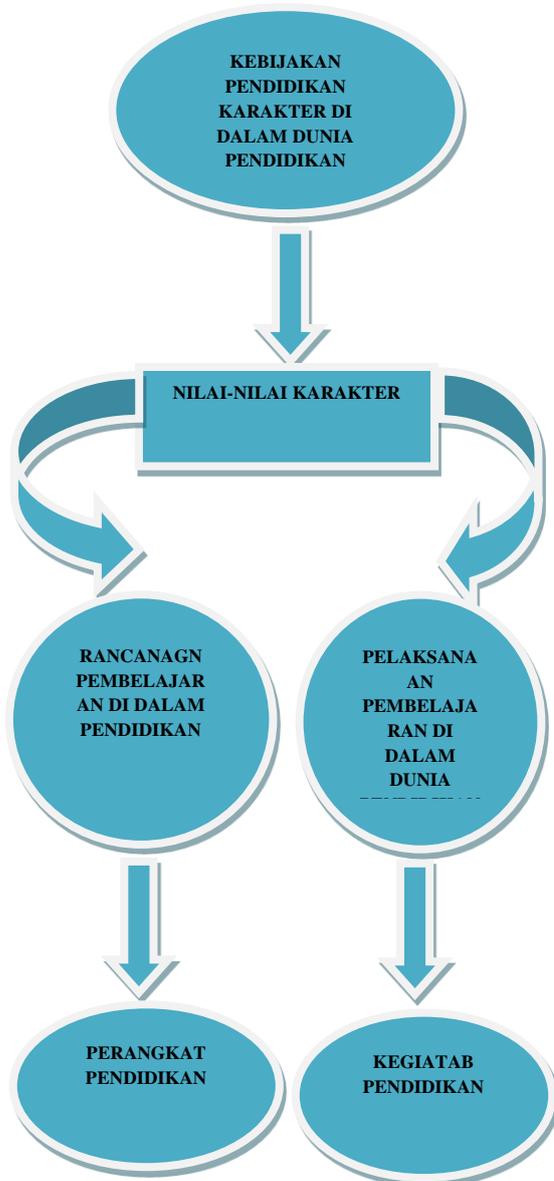
Secara history, apabila memerhatikan hakikat kontennya di dalam dunia pendidikan karakter sangat lah penting di terapkan pada diri siswa siswi yang ada di sekolah. Usia pendidikan karakter sesungguhnya seumur dengan sejarah pendidikan itu sendiri, hanya saja menyangkut istilah yang dipakai pada pendidikan karakter baru muncul pada dekade terakhir di Amerika Serikat, termasuk yang di pakai di Indonesia dalam dua tahun terakhir. seperti yang di nyatakan oleh Suyata (2011:13), dalam 10-20 tahun yang lalu istilah pendidikan moral lebih populer di Amerika, sedangkan istilah pendidikan karakter lebih populer di kawasan asia. Sementara itu, di Inggris orang lebih menyukai istilah pendidikan nilai. Secara khusus di Indonesia telah dipakai pula istilah pendidikan budi pekerti dan pendidikan moral Pancasila.

Sepanjang sejarahnya, di seluruh dunia ini, pendidikan pada hakikatnya memiliki dua tujuan, yaitu membantu manusia untuk menjadi cerdas dan pintar (smart), dan membantu mereka menjadi manusia yang baik (good). Menjadikan manusia cerdas dan pintar, boleh jadi mudah melakukannya, tetapi menjadikan manusia agar menjadi orang yang baik dan bijak, tampaknya jauh lebih sulit atau bahkan sangat sulit. Dengan demikian, sangat wajar apabila dikatakan bahwa problem moral merupakan persoalan akut atau penyakit kronis yang mengiringi kehidupan manusia kapan dan di mana pun.

Karakter siswa sangat penting dalam kegiatan pembelajaran karena karakter siswa merupakan segi-segi latar belakang pengalaman siswa yang berpengaruh terhadap keefektifan proses belajar sehingga karakter tersebut sangat mempengaruhi keefektifan dalam proses pembelajaran, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan

kebijakan berbasis karakter siswa disekolah/ madrasah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif pendekatan studi dokumen/teks. Jenis penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, metode ini dipilih karena lebih mudah menghadapi kenyataan, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan peneliti dan informan, diserta metode ini lebih peka dan dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh Bersama terhadap nilai-nilai yang dihadapi. Serta metode ini bertujuan untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data dari hasil penelitian tersebut.

KERANGKA TEORITIS



METODE PENELITIAN

Penulis meneliti pada tahun 2023 di salah satu sekolah yang ada di provinsi jambi. Di dalam pembuatan artikel ini, penulis meneliti sebuah permasalahan dengan melakukan penelitian dengan beberapa cara yaitu dengan cara observasi, wawancara, serta ada beberapa cara menggunakan catatan lapangan.

Metode dengan observasi di lakukan di lingkup sekolah, metode ini bermanfaat untuk memahami konteks apa yang akan di teliti secara menyeluruh. Selain menggunakan metode observasi, di dalam penelitian ini penulis juga menggunakan metode wawancara, dengan cara mewawancarai beberapa informan yang ada di lingkungan sekolah serta penulis juga menggunakan metode catatan lapangan, dimana catatan lapangan ini berfungsi sebagai alat pendukung penemuan pengetahuan teori yang di dukung oleh data yang konkrit.

HASIL PEMBAHASAN

Pendidikan adalah sesuatu yang tidak terbatas. Pada dasarnya, pendidikan sangatlah dibutuhkan bagi segenap manusia. Tanpa pendidikan, dampak buruk pada manusia itu akan terjadi. Pendidikan akan menciptakan manusia yang lebih baik dari masa ke masa, dengan kemampuan mereka masing-masing yang turut berkembang selama mereka belajar akan suatu hal tertentu. Oleh karena itu, tiada batasan bagi pendidikan.

Hal ini juga mencakup dalam aspek usia, dimana konon orang-orang dengan usia lanjut juga masih tetap membutuhkan belajar, dan pendidikan adalah wadah untuk itu. Jenis Pendidikan di Indonesia, ada beberapa jenis pendidikan di Indonesia, diantaranya yaitu:

1. Pendidikan Formal
2. Pendidikan Non Formal

Pendidikan formal adalah pendidikan yang memungkinkan seluruh komponen pendidikan yang ada terdata dan terintegrasi dengan pemerintah. Pendidikan formal, juga dikatakan sebagai jalur pendidikan yang berjenjang dan berstruktur, mulai dari tingkat Sekolah Dasar, SMP/ MTs, SMA/ SMK/ MA.

Sementara pendidikan Non Formal, adalah program pendidikan yang dirancang khusus untuk meningkatkan pengetahuan manusia. Umumnya, pendidikan non formal digunakan

sebagai pendukung/ pelengkap dari pendidikan formal. Di dalam dunia pendidikan, tentunya ada yang namanya pendidikan karakter

PENGERTIAN PENDIDIKAN KARAKTER

Kata character berasal dari bahasa Yunani charassein, yang berarti to engrave (melukis, menggambar), seperti orang yang melukis kertas, memahat batu atau metal. Berakar dari pengertian yang seperti itu, character kemudian diartikan sebagai tanda atau ciri yang khusus, dan karenanya melahirkan satu pandangan bahwa karakter adalah 'pola perilaku yang bersifat individual, keadaan moral seseorang'. Setelah melewati tahap anak-anak, seseorang memiliki karakter, cara yang dapat diramalkan bahwa karakter seseorang berkaitan dengan perilaku yang ada di sekitar dirinya (Kevin Ryan, 1999:5).

Di sisi lain, Pendidikan karakter adalah suatu sistem penamaan nilai-nilai karakter yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan. Pengembangan karakter bangsa dapat dilakukan melalui perkembangan karakter individu seseorang. Akan tetapi, karena manusia hidup dalam lingkungan sosial dan budaya tertentu, maka perkembangan karakter individu seseorang hanya dapat dilakukan dalam lingkungan sosial dan budaya yang bersangkutan. Artinya, perkembangan budaya dan karakter dapat dilakukan dalam suatu proses pendidikan yang tidak melepaskan peserta didik dari lingkungan sosial, budaya masyarakat, dan budaya bangsa. Lingkungan sosial dan budaya bangsa adalah Pancasila, jadi pendidikan budaya dan karakter adalah mengembangkan nilai-nilai Pancasila pada diri peserta didik melalui pendidikan hati, otak, dan fisik.

Pendidikan karakter atau pendidikan watak sejak awal munculnya pendidikan oleh para ahli dianggap sebagai suatu hal yang niscaya. John Sewey, misalnya, pada tahun 1916 yang mengatakan bahwa sudah merupakan hal yang lumrah dalam teori pendidikan bahwa pembentukan watak merupakan tujuan umum pengajaran dan pendidikan budi pekerti di sekolah.

Karakter yang baik berkaitan dengan mengetahui yang baik (knowing the good), mencintai yang baik (loving the good), dan melakukan yang baik (acting the good). Ketiga ideal ini satu sama lain sangat berkaitan. Seseorang lahir dalam keadaan bodoh, dorongan-

dorongan primitif yang ada dalam dirinya kemungkinan dapat memerintahkan atau menguasai akal sehatnya.

URGENSI PENDIDIKAN KARAKTER

Perlunya pendidikan karakter mendesak untuk dilaksanakan adalah adanya gejala - gejala yang menandakan tergerusnya karakter bangsa. Tanda-tanda merosotnya karakter bangsa Indonesia, senyampang apa yang dinyatakan Thomas Lickona (dalam Barnawi dan M. Arifin, 2016: 12-13), tentang sepuluh tanda zaman yang kini terjadi, yakni sebagai berikut : a) Meningkatnya kekerasan di kalangan remaja (atau bahkan anak-anak). b) Membudayanya ketidakjujuran. c) Sikap fanatik terhadap kelompok/grup (geng) tertentu. d) Rendahnya rasa hormat terhadap orang tua atau guru. e) Semakin kaburnya moral baik dan buruk. f) Penggunaan tutur bahasa yang kian memburuk (makian, cacian, ejekan, hujatan, fitnah, mesoh, alay) tanpa memperhatikan perasaan orang lain. g) Meningkatnya perilaku yang merusak diri seperti penggunaan narkoba, alkohol, judi dan seks bebas. H) Rendahnya rasa tanggung.

Dampak dari merosotnya karakter, secara individu jelas, seseorang yang melakukan salah satu tindakan (dari 10 yang dipaparkan di atas) berpotensi bermasalah dengan hukum, terlibat dalam kekerasan, hilangnya percaya diri, dan menjadi individu yang tidak jelas, tidak memiliki karakter.

TUJUAN PENDIDIKAN KARAKTER

Perkembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa, Pengertian Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) merumuskan fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang harus digunakan dalam mengembangkan upaya pendidikan di Indonesia. Pasal 3 UU Sisdiknas menyebutkan, “Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Tujuan Pendidikan Pendidikan Karakter Bangsa diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan potensi afektif peserta didik sebagai manusia dan Warga Negara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa.
2. Mengembangkan Kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya dan karakter bangsa.
3. Menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik sebagai generasi penerus bangsa.
4. Mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif, berwawasan kebangsaan dan.
5. Mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan, serta dengan rasa kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan.

ALASAN MENGAPA PERLUNYA PENDIDIKAN KARAKTER

Menurut Lickona ada tujuh alasan mengapa pendidikan karakter itu harus disampaikan. Ketujuh alasan yang dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Cara terbaik untuk menjamin anak-anak (siswa) memiliki kepribadian yang baik dalam kehidupannya.
2. Cara untuk meningkatkan prestasi akademik.
3. Sebagian siswa tidak dapat membentuk karakter yang kuat bagi dirinya di tempat lain.
4. Persiapan siswa untuk menghormati pihak atau orang lain dan dapat hidup dalam masyarakat yang beragam.
5. Berangkat dari akar masalah yang berkaitan dengan problem moral-sosial, seperti ketidaksopanan, ketidakjujuran, kekerasan, pelanggaran kegiatan seksual, dan etos kerja (belajar) yang rendah.
6. Persiapan terbaik untuk menyongsong perilaku di tempat kerja.
7. Pembelajaran nilai-nilai budaya yang merupakan bagian dari kerja peradaban.

PENDIDIKAN KARAKTER

Secara sederhana, pendidikan karakter dapat didefinisikan sebagai segala usaha yang dapat dilakukan untuk mempengaruhi karakter siswa. Tetapi, untuk mengetahui

pengertian yang tepat, dapat dikemukakan di sini definisi pendidikan karakter yang disampaikan oleh Thomas Lickona.

Pengertian yang disampaikan Lickona di atas memperlihatkan adanya proses perkembangan yang melibatkan pengetahuan (*moral knowing*), perasaan (*moral feeling*), dan tindakan (*moral action*), sekaligus juga memberikan dasar yang kuat untuk membangun pendidikan karakter yang koheren dan komprehensif.

Moral Knowing (Pengetahuan Moral)

Terdapat beragam jenis pengetahuan moral yang berkaitan dengan tantangan moral kehidupan. Berikut ini enam tahap yang harus dilalui dalam rangka mencapai tujuan-tujuan pendidikan moral.

- a. *Moral awarness* (kesadaran moral). Kelemahan moral yang melanda hampir semua manusia dari segala jenis usia adalah adanya kebutaan atau kepapaan moral. Secara sederhana kita jarang melihat adanya cara-cara tertentu dalam masyarakat yang memperhatikan dan melibatkan isu-isu moral serta penilaian moral.
- b. *Knowing moral values* (pengetahuan nilai-nilai moral). Nilai-nilai moral seperti rasa hormat terhadap kehidupan dan kebebasan, tanggung jawab terhadap orang lain, kejujuran, keadilan, toleransi, sopansantun, disiplin-diri, integritas, kebaikan, keharuan-keibaan, dan keteguhan hati atau keberanian, secara keseluruhan menunjukkan sifat-sifat orang yang baik.
- c. *Perspective-taking*. *Perspective-taking* (*hasibu anfusakum qabla antuhasabu*) adalah kemampuan untuk mengambil pelajaran dari peristiwa yang menimpa atau terjadi pada orang lain; melihat suatu keadaan sebagaimana mereka melihatnya; mengimajinasikan bagaimana mereka berpikir, bereaksi, dan merasakannya. Hal ini merupakan prasyarat bagi dilakukannya penilaian moral.
- d. *Moral reasoning* (alasan moral). *Moral reasoning* meliputi pemahaman mengenai apa itu perbuatan moral dan mengapa harus melakukan perbuatan moral.
- e. *Decesion-making* (pengambilan keputusan). Kemampuan seseorang untuk mengambil sikap ketika dihadapkan dengan problema moral adalah suatu keahlian yang bersifat reflektif. Apa yang dipilih dan apa akibat atau resiko dari

pengambilan keputusan moral itu, bahkan harus sudah diajarkan sejak TK (Taman Kanak-kanak).

- f. Self-knowledge. Mengetahui diri sendiri atau mengukur diri sendiri merupakan jenis pengetahuan moral yang paling sulit, tetapi hal ini sangat penting bagi perkembangan moral. Menjadi orang yang bermoral memerlukan kemampuan untuk melihat perilaku diri sendiri dan mengevaluasinya secara kritis.

Moral Feeling (Perasaan Moral)

- a. Conscience (Kesadaran). Kesadaran memiliki dua sisi: sisi kognitif (pengetahuan tentang sesuatu yang benar), dan sisi emosional (perasaan adanya kewajiban untuk melakukan apa yang benar itu). Kesadaran yang matang, disamping adanya perasaan.
- b. Self-esteem (penghargaan-diri). Ketika kita memiliki ukuran yang sehat terhadap penghargaan-diri, kita menilai diri kita sendiri. Ketika kita menilai diri kita sendiri, kita akan menghargai atau menghormati diri kita sendiri. Kita tidak akan menyalahgunakan anggota tubuh atau pikiran kita atau mengizinkan pihak-pihak untuk menyalah gunakan diri kita.
- c. Empathy (empati). Empati adalah identifikasi dengan, atau seakan-akan mengalami, keadaan yang dialami pihak lain. Empati memungkinkan kita untuk memasuki perasaan yang dialami pihak lain. Empati merupakan sisi emosional dari perspective-taking (hasibu anfasakum qabla antuhasau).
- d. Loving the good. Bentuk karakter yang paling tinggi diperlihatkan dalam kelakuan yang baik. Ketika seseorang mencintai yang baik, maka dengan senang hati ia akan melakukan yang baik. Ia secara moral memiliki keinginan untuk berbuat baik, bukan semata-mata karena kewajiban moral.
- e. Self-control. Emosi dapat membanjiri (mengatasi) alasan. Alasan seseorang mengapa self-control diperlukan untuk kebaikan moral. Kontrol-diri juga diperlukan bagi kegemaran-diri anak-anak muda.
- f. Humility (kerendahan hati). Kerendahan hati merupakan kebajikan moral yang sering diabaikan, padahal merupakan bagian yang esensial dari karakter yang baik.

Kerendahan hati merupakan sisi yang efektif dari pengetahuan-diri (self-knowledge).

Moral Action (Tindakan Moral)

Moral action (tindakan moral), dalam pengertian yang luas, adalah akibat atau hasil dari moral knowing dan moral feeling. Apabila seseorang memiliki kualitas moral intelek dan emosi, kita bisa memperkirakan bahwa mereka akan melakukan apa yang mereka ketahui dan rasakan.

- a. Kompetensi (Competence). Moral kompetensi adalah kemampuan untuk mengubah penilaian dan perasaan moral ke dalam tindakan moral yang efektif.
- b. Kemauan (Will). Pilihan yang benar (tepat) akan suatu perilaku moral biasanya merupakan sesuatu yang sulit. Untuk menjadi dan melakukan sesuatu yang baik biasanya mensyaratkan adanya keinginan bertindak yang kuat, usaha untuk memobilisasi energi moral. Kemauan merupakan inti (core) dari dorongan moral.
- c. Kebiasaan (Habit). Dalam banyak hal, perilaku moral terjadi karena adanya kebiasaan.

STRATEGI PELAKSANAAN PENDIDIKAN KARAKTER DI SEKOLAH

Kualitas pembelajaran menjadi kunci dalam peningkatan sumber daya manusia. Pembelajaran yang berkualitas merupakan pembelajaran yang terencana dan sengaja diciptakan, bukan belajar yang terjadi secara insidental. Strategi pelaksanaan pendidikan karakter yang diterapkan di sekolah dapat dilakukan melalui empat cara, yaitu: (1) pembelajaran (teaching), (2) keteladanan (modeling), (3) penguatan (reinforcing), dan (4) pembiasaan (habituating).

Efektivitas pendidikan karakter sangat ditentukan oleh adanya pembelajaran (teaching), keteladanan (modeling), penguatan (reinforcing), dan pembiasaan (habituating) yang dilakukan secara serentak dan berkelanjutan. Pendekatan yang strategis terhadap pelaksanaan ini melibatkan tiga komponen yang saling terkait satu sama lain, yaitu: (1) sekolah (kampus), (2) keluarga, dan (3) masyarakat.

1. Ketika komponen sekolah (kampus) sepenuhnya akan menerapkan dan melaksanakan nilai-nilai (karakter) tertentu (prioritas), maka setiap nilai yang akan

ditanamkan atau dipraktikkan tersebut harus senantiasa disampaikan oleh para guru melalui pembelajaran langsung (sebagai mata pelajaran) atau mengintegrasikannya ke dalam setiap mata pelajaran.

2. Nilai-nilai prioritas tersebut selanjutnya harus juga dimodelkan (diteladankan) secara teratur dan berkesinambungan oleh semua warga sekolah (kampus), sejak dari petugas parkir, petugas kebersihan, petugas keamanan, karyawan administrasi, guru, dan pimpinan sekolah.
3. Selanjutnya, nilai-nilai itu harus diperkuat oleh penataan lingkungan dan kegiatan-kegiatan di lingkungan sekolah (kampus). Penataan lingkungan di sini antara lain dengan menempatkan banner (spanduk-spanduk) yang mengarah dan memberikan dukungan bagi terbentuknya suasana kehidupan sekolah (kampus) yang berkarakter terpuji.
4. Pembiasaan (habituation) dapat dilakukan di sekolah dengan berbagai cara dan menyangkut banyak hal seperti disiplin waktu, etika berpakaian, etika pergaulan, perlakuan siswa terhadap karyawan, guru, dan pimpinan, dan sebaliknya. Pembiasaan yang dilakukan oleh pimpinan, guru, siswa, dan karyawan, dalam disiplin suatu lembaga pendidikan merupakan langkah yang sangat strategis dalam membentuk karakter secara bersama.

KEBIJAKAN PENDIDIKAN KARAKTER

Pendidikan formal tidak pernah lepas dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Salah satu kebijakan tersebut adalah mengenai struktur kurikulum, kompetensi yang harus dicapai, sistem evaluasi, dan lain sebagainya. Berkaitan dengan pendidikan karakter, ada beberapa kebijakan yang diundangkan sebagai pijakan hukum pelaksanaan pendidikan karakter di tanah air.

Kebijakan merupakan aktivitas politik yang dilaksanakan dengan sengaja berdasarkan pemikiran yang bijaksana dan terarah yang dilakukan oleh organisasi, lembaga maupun instansi pemerintah dalam memecahkan permasalahan untuk mendapatkan keputusan yang sesuai dengan tujuan (Risnawan, 2017). Setiap aspek kehidupan terdapat kebijakan masing-masing yang dijadikan pedoman dan panduan dalam melakukan aktivitas dan membatasi perilaku sehingga lebih jelas dan terarah. Kebijakan ini

pun berlaku pada sistem pendidikan yang disebut dengan kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan ada dikarenakan munculnya permasalahan-permasalahan yang terjadi di bidang pendidikan (Sutapa, 2008). Permasalahan ini terjadi dikarenakan terdapatnya kesenjangan antara penyelenggara pendidikan dengan tujuan pendidikan (Suyahman, 2016). Kebijakan pendidikan merupakan sebuah aktivitas dalam merumuskan langkah maupun tahapan dalam penyelenggaraan

Pendidikan melalui penjabaran visi misi pendidikan yang bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan pada waktu tertentu (Fatkuroji, 2017). Selain itu ada juga yang berpendapat bahwa kebijakan pendidikan berhubungan dengan efektivitas dan efisiensi anggaran Pendidikan (Riant, 2008). Kebijakan pendidikan merupakan kebijakan publik yang mengelola khusus bidang pendidikan serta berhubungan dengan alokasi, penyerapan dan distribusi sumber pelaksanaan pendidikan maupun pengelolaan perilaku pendidikan (Bakry, 2010). Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan merupakan kebijakan yang berhubungan dengan bidang pendidikan dalam proses penjabaran visi misi pendidikan agar tercapainya tujuan pendidikan melalui langkah strategis pelaksanaan pendidikan.

Menurut Barnawi dan M. Arifin (2016: 43), ada beberapa rujukan penyusunan kebijakan nasional pendidikan karakter : a) Undang - Undang RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005 – 2025. b) Undang - Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010. d) Arahan Presiden RI dalam Sidang Kabinet.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN KARATER

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang disusun secara matang dan terperinci. Secara sederhana implelementasi dapat juga diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Browne dan Wildavsky (dalam Nurdin Dan Usman,2004:70) mengemukakan bahwa implementasi adalah suatu perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.

Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan menyangkut 3 hal, yaitu pertama adanya tujuan atau sasaran kebijakan, kedua adanya aktivitas atau kegiatan adanya pencapaian tujuan, dan ketiga adalah adanya hasil kegiatan.

Proses kebijakan kepala sekolah dalam kaitannya dengan pendidikan karakter salah satu faktor utama dalam perumusan kebijakan adalah identifikasi masalah-masalah dalam fokus kebijakan antara lain masalah sub sistem pendukung kebijakan yaitu 1) belum ada tim kerja yang bertugas merumuskan kebijakan, 2) belum adanya lembaga atau sistem yang menjamin bahwa kebijakan dilaksanakan sesuai dengan tujuan. Hal ini sejalan dengan pendapat Paudel (2009, hlm.39) yang menjelaskan bahwa dua faktor penting dalam implementasi kebijakan adalah kapasitas dan kemauan politik yang tertuang dalam kebijakan untuk memecahkan masalah. Kapasitas dapat dilihat dari kemampuan untuk melaksanakan tahapan dalam perumusan kebijakan dan kemauan dapat dilihat dari bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan.

Sekolah merupakan implikasi dari adanya kebijakan kepala sekolah untuk mewujudkan proses pendidikan karakter yang efektif. Keberhasilan kegiatan sebagai realisasi kebijakan pendidikan karakter tidak terlepas dari adanya kemauan politik serta kapasitas untuk merealisasikan kebijakan. Kegiatan disusun berdasarkan hasil identifikasi internal dan eksternal sekolah termasuk bagaimana dukungan para orang tua terhadap program-program yang bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada para peserta didik.

Salah satu faktor penting yang mendukung sekaligus menjadi penghambat dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan karakter adalah budaya. Budaya dapat menghambat sekaligus dapat mendorong meningkatnya komitmen serta membangun kemantapan sistem sosial dalam penyelenggaraan pendidikan karakter. Sub budaya pada masing-masing unit kerja baik di tingkat kelas enam atau satu berbeda. Sub budaya yang berbeda antar tingkatan dalam penyelenggaraan pendidikan karakter dapat menghambat bagaimana sebuah kegiatan dilaksanakan.

Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan karakter seperti dinyatakan oleh Bahm (2012, hlm.7) tidak hanya dapat dilihat dari adanya keterlibatan sekolah namun seluruh stakeholder sekolah. Artinya pendidikan karakter yang terjamin adalah pada saat sistem pendidikan tersebut melibatkan seluruh stakeholder dalam mempersiapkan sebuah proses yang sistematis dan terencana. Keterlibatan tersebut akan terwujud dengan adanya sistem

yang menjamainya yang dihasilkan dari keterlibatan para stakeholder. Hal yang sama disampaikan oleh Berkowitz dan Bustamante (2013, hlm 9) yang memberikan gambaran tentang model pendidikan karakter yang disusun berdasarkan praktik-praktik terbaik yaitu model PRIME.

Salah satu elemen inti dalam model tersebut yaitu adanya perkembangan positif hubungan baik diantara para stakeholder. Hubungan tersebut mengarah pada keterlibatan penuh dan komitmen untuk mendukung keberadaan pendidikan karakter. Keberhasilan sekolah menyediakan sistem yang dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan pelanggan terhadap pendidikan karakter adalah sebuah keharusan. Reichenbacher dan Einax (2011, hlm.2) menjelaskan bahwa penjaminan mutu meliputi seluruh kegiatan yang difokuskan pada pemenuhan mutu sesuai dengan kebutuhan yang memberikan rasa puas. Guna memberikan kepuasan maka diperlukan dukungan dan keterlibatan dalam perancangan sistem penjaminan mutu internal dalam pendidikan karakter.

PENILAIAN PENDIDIKAN KARAKTER

Penilaian Pendidikan karakter dilakukan dalam bentuk non tes melalui pengamatan; anekdote; tugas; laporan dan sebagainya. Pendidik memberikan kesimpulan / pertimbangan tentang pencapaian indikator atau bahkan suatu nilai. Kesimpulan / pertimbangan tersebut dapat dinyatakan dalam pernyataan kualitatif dan memiliki makna terjadinya proses pembangunan karakter sebagai berikut : a) BT : Belum Terlihat, peserta didik belum memperlihatkan tanda-tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator; b) MT : Mulai Terlihat, sudah mulai memperlihatkan adanya tanda-tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator, c) MB : Mulai Berkembang, sudah memperlihatkan berbagai tanda perilaku yang dinyatakan dalam indikator dan mulai konsisten, d) MK ; Membudaya, peserta didik terus-menerus memperlihatkan perilaku yang dinyatakan dalam indikator secara konsisten (Darmuin,dkk. 2012: 47).

KESIMPULAN

Pendidikan karakter atau pendidikan watak sejak awal munculnya pendidikan oleh para ahli dianggap sebagai suatu hal yang niscaya. John Sewey, misalnya, pada tahun 1916 yang mengatakan bahwa sudah merupakan hal yang lumrah dalam teori pendidikan bahwa

pembentukan watak merupakan tujuan umum pengajaran dan pendidikan budi pekerti di sekolah.

Perkembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa, Pengertian Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) merumuskan fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang harus digunakan dalam mengembangkan upaya pendidikan di Indonesia.

Pasal 3 UU Sisdiknas menyebutkan, “Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Pengertian yang disampaikan Lickona di atas memperlihatkan adanya proses perkembangan yang melibatkan pengetahuan (moral knowing), perasaan (moral feeling), dan tindakan (moral action), sekaligus juga memberikan dasar yang kuat untuk membangun pendidikan karakter yang koheren dan komprehensif.

Kesimpulan / pertimbangan tersebut dapat dinyatakan dalam pernyataan kualitatif dan memiliki makna terjadinya proses pembangunan karakter sebagai berikut : a) BT : Belum Terlihat, peserta didik belum memperlihatkan tanda-tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator; b) MT : Mulai Terlihat, sudah mulai memperlihatkan adanya tanda-tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator, c) MB : Mulai Berkembang, sudah memperlihatkan berbagai tanda perilaku yang dinyatakan dalam indikator dan mulai konsisten, d) MK ; Membudaya, peserta didik terus-menerus memperlihatkan perilaku yang dinyatakan dalam indikator secara konsisten (Darmuin,dkk.

DAFTAR REFERENSI

- II, B. (1977). A. Pendidikan. <https://digilib.ikipgriptk.ac.id/id/eprint/87/7/BAB%20II.pdf>
- Samsuri, T. (2003). Kajian, Teori, Kerangka Konsep dan Hipotesis dalam Penelitian. http://repository.unp.ac.id/1656/1/TJEJEP%20SAMSURI_209_03.pdf
- Bab, I. V. (2018). Kebijakan pendidikan. *ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN*, 133. <https://journal.uny.ac.id/index.php/jpka/article/viewFile/1316/1094>
- Dalyono, B., & Lestariningsih, E. D. (2016). Implementasi penguatan pendidikan karakter di sekolah. *Bangun Rekaprima: Majalah Ilmiah Pengembangan Rekayasa, Sosial Dan Humaniora*, 3(2, Oktober), 33-42. <http://fsd.unm.ac.id/wp-content/uploads/2020/06/Panduan-Artikel-TA-2020.pdf>
- Maunah, B. (2009). Ilmu pendidikan. [file:///C:/Users/R%20M%20K/Downloads/Warni-T-Sumar-Analysis-Kebijakan-Pendidikan-Kajian-Teoretis-Eksploratif-dan-Aplikatif%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/R%20M%20K/Downloads/Warni-T-Sumar-Analysis-Kebijakan-Pendidikan-Kajian-Teoretis-Eksploratif-dan-Aplikatif%20(2).pdf)
- Omeri, N. (2015). Pentingnya pendidikan karakter dalam dunia pendidikan. *Manajer Pendidikan: Jurnal Ilmiah Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana*, 9(3). <file:///C:/Users/R%20M%20K/Downloads/1145-Article%20Text-1377-2172-10-20170317.pdf>
- Elwijaya, F., Mairina, V., & Gistituati, N. (2021). Konsep dasar kebijakan pendidikan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 67. [file:///C:/Users/R%20M%20K/Downloads/817-2306-1-PB%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/R%20M%20K/Downloads/817-2306-1-PB%20(1).pdf)
- pendidikan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 67. https://jurnal.polines.ac.id/index.php/bangun_rekaprima/article/viewFile/865/699
- Dalyono, B., & Lestariningsih, E. D. (2016). Implementasi penguatan pendidikan karakter di sekolah. *Bangun Rekaprima: Majalah Ilmiah Pengembangan Rekayasa, Sosial Dan Humaniora*, 3(2, Oktober), 33-42. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=q92sEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR3&dq=implementasi+kebijakan+pendidikan+karakter&ots=jC-9zf2Q0K&sig=LBSGlwbB5U5JSzMpQsfs_SVYw7Y&redir_esc=y#v=onepage&q=implementasi%20kebijakan%20pendidikan%20karakter&f=false
- Mokodompit, M., Wullur, M. M., Pasandaran, S., & Rotty, V. N. (2023). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN KARAKTER*. CV Literasi Nusantara Abadi. <https://ejournal.upi.edu/index.php/JAPSPs/article/view/6676>
- Suherman, S. (2017). Analisis implementasi kebijakan pendidikan karakter. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 21(2), 68-80.